



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 53/Pdt.P/2012/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Istbat Nikah yang dimohonkan oleh :

PEMOHON I, umur 32 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I";-----

PEMOHON II, umur 30 Tahun, agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II";-----

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2012, yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam buku Register Perkara Permohonan dibawah nomor: 53/Pdt.P/2012/PA.Cbn. tertanggal 27 Januari 2012, yang pada Pokoknya para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan hal-hal sebagai:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Oktober 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.
- 2 Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan tersebut adalah Wali Nasab yaitu : WALI NIKAH (Ayah Pemohon II) dengan Mas Kawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai, dengan dihadiri saksi-saksi yaitu 1. SAKSI NIKAH I , dan 2. SAKSI NIKAH II;
- 3 Bapak bahwa dari perkawinan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I Tanggal Lahir, 20 Juli 2004;
- 4 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dan sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah.

Halaman 1 dari 8 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2012/PA.Cbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah, untuk melengkapi persyaratan Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya.
- 6 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan pernikahan dengan status Jejaka dan Gadis.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- . Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, adalah sah.
- . Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Surat Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana para Pemohon menikah, hal tersebut telah dilakukan namun tidak berhasil, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mohon agar pemeriksaan perkaranya dilanjutkan, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya dengan membacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isi dan maksud Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini; ----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti yaitu menghadirkan 2 orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Bahwa saksi bersumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, hubungan saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II,
- bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2003 ,
- bahwa, saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, dengan wali Ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa seperangkat alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat tunai, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan ada ijab kabul;

- bahwa, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Termohon dan Pemohon II berstatus Gadis, dan tidak ada penghalang untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum yang lainnya;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dari sejak menikah sampai sekarang, dan tidak pernah bercerai,
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak diberikan Surat Kutipan Akta Nikah,
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melakukan itsbat Nikah untuk punya surat Nikah,
- bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan namun telah dikaruniai seorang anak bernama: Siti Nurawaliyah;
- bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangannya;

1 **SAKSI II**, umur 59 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor;

Bahwa saksi bersumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa, hubungan saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 11 Oktober 2003 ,
- bahwa, saksi hadir waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, dengan wali Ayah kandung Pemohon II, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan ada ijab kabul;
- bahwa, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Termohon dan Pemohon II berstatus Gadis, dan tidak ada penghalang untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun hukum yang lainnya;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dari sejak menikah sampai sekarang, dan tidak pernah bercerai,

Halaman 3 dari 8 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2012/PA.Cbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama ini untuk Itsbat Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah tidak diberikan Surat Kutipan Akta Nikah,
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melakukan itsbat Nikah untuk punya surat Nikah,
- bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan namun telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK I;
- bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;
bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan secara lisan tertanggal 29 Februari 2012, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan yang telah ditentukan dan Pemohon I dan Pemohon II telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 50 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karena sebab lain, sedangkan pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasar pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, serta keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2012/PA.Cbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 11 Oktober 2003, dengan wali Ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa seperangkat alat shalat Tunai, namun Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang tidak ada; -
- bahwa, selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dikaruniai seorang anak bernama: ANAK I;
- bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan PEMOHON I tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain kecuali hanya Pemohon II istrinya sampai sekarang;
- bahwa, hanya Pemohon II sebagai istri sah dari Pemohon I;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II itsbat Nikah ini untuk dijadikan pegangan bagi kepentingan hukum, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk dipergunakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami isrti, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2003, dengan Wali nikah Ayah kandung Pemohon II, mahar berupa seperangkat alat shalat tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Utay dan Ujang Saidi, dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan, selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK I, dan selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai. Sedangkan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti Buku Kutipan Akta Nikah, untuk dijadikan pegangan bagi Pemohon I dan Pemohon II adanya ikatan suami istri seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud dari pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2003 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon I dan permohonan Pemohon II patut dikabulkan dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud dari pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menetapkan sebagai hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2003 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor adalah sah;
- 3 Memerintahkan kepada Pemoho I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor ;---
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **29 Februari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Tsani 1433 H.**, oleh kami Drs. ABD. LATIF, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AZID IZUDDIN, M.H., Dan Drs. H. JARKASIH, M.H. Masing-masing sebagai hakim anggota, serta Hj. NURYANI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu dibacakan oleh Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. ABD. LATIF, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AZID IZUDDIN, M.H.

Drs. H. JARKASIH, M.H.

Pantera Pengganti,

Hj. NURYANI, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaptaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	30.000,00
3	Panggilan	Rp.	150.000,00
4	Redaksi	Rp.	5.000,00
5	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00 +</u>

Halaman 7 dari 8 hal. Pen. No. 53/Pdt.P/2012/PA.Cbn..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 221.000,00